

## **PEMKAB BUTON SELATAN CIPTAKAN MAGNET BARU UNTUK WISATAWAN KE GUNUNG SEJUK**



Sumber gambar :  
<https://kendaripos.fajar.co.id/>

### **Isi Berita:**

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pj. Bupati Buton Selatan Parinringi terus mendorong pemerintah desa untuk berinovasi atas potensi wilayahnya masing-masing. Harapan itu langsung diatensi oleh Pemdes Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa. Gunung sejuk dikenal sebagai desa yang memiliki sumber air yang melimpah. Bahkan meski dilanda kemarau, desa itu tak pernah mengalami kekeringan.

Olehnya itu, Pemdes Gunung Sejuk memutuskan untuk membangun objek wisata air. Selasa (9/9) kemarin, Parinringi menunjukkan apresiasinya dengan melaunching langsung pembangunan wisata air Kamar Bangko Gunung Sejuk.

“Ini inovasi yang sangat bagus dari Pemdes Gunung Sejuk. Karena memang airnya di sini tidak pernah kering, meski wisata airnya masih skala kecil untuk anak-anak sekolah, tapi pelan-pelan ini akan ikut menandai kemajuan sebuah desa,” ungkap Parinringi.

Eks penjabat bupati Kolaka Utara ini juga menambahkan, Pemda Busel akan melakukan intervensi untuk kemajuan Gunung Sejuk. Salah satunya mendorong program cetak sawah baru di desa tersebut. “Kita inventarisasi dulu, berapa luasan lokasi yang cocok

jadi sawah. Karena tahun 2025 ini kita dapat jatah 600 hektar cetak sawah baru dari kementerian, nah Gunung Sejuk nanti kita masukan juga dalam peta sawah itu,” tambahnya.

Senada dengan Pj. Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Buton Selatan La Amirudin mengatakan gebrakan yang dilakukan Desa Gunung Sejuk patut diacungi jempol. Sebab membangun desa dari sektor pariwisata merupakan program yang bisa memberikan nilai tambah bagi desa dan masyarakatnya.

“Kekayaan alam dalam hal ini air yang melimpah menginsipirasi desa untuk membangun wisata air. Nah ini tidak boleh hanya sampai disini, untuk menjadikannya ikon desa nantinya butuh dukungan semua elemen desa, dan kita juga akan terus memberikan dukungan,”

### **Sumber Berita:**

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/11/parinringi-apresiasi-pemdes-gunung-sejuk/>, Parinringi Apresiasi Pemdes Gunung Sejuk; tanggal 11 September 2024;
2. <https://telisik.id/news/pemkab-buton-selatan-ciptakan-magnet-baru-untuk-wisatawan-ke-gunung-sejuk>, Pemkab Buton Selatan Ciptakan Magnet Baru untuk Wisatawan ke Gunung Sejuk, tanggal 10 September 2024; dan
3. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/966591/pemkab-busel-rencanakan-cetak-sawah-di-desa-gunung-sejuk>, Pemkab Busel Rencanakan Cetak Sawah di Desa Gunung Sejuk, tanggal 11 September 2024.

### **Catatan:**

- Pengembangan wisata air Kamar Bangko Gunung Sejuk dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Gunung Sejuk juga direncanakan menjadi salah satu lokasi program cetak sawah baru.
- Terkait hal di atas di atur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
    - a. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;”
    - b. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
      - a) Pendapatan Asli Daerah meliputi:
        - 1) pajak daerah;
        - 2) retribusi daerah;
        - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

- 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
  - b) pendapatan transfer; dan
  - c) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
- c. Pasal 286:
- a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
  - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
  - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.